

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan egaliter dalam mengantar mekanisme kekuasaan dan partisipasi publik. Ditopang dengan konsepnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dalam arti luasnya demokrasi dapat diartikan kekuasaan rakyat. Dalam sistem demokrasi, dilakukan pemilihan umum untuk memilih pemimpin suatu Negara. Dalam pemilihan ini tentu para aktor politik memiliki peran yang besar dalam menentukan arah dari suara rakyat.

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) merupakan sarana demokrasi yang menjadi ajang bagi kedaulatan rakyat. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan Umum Presiden merupakan cerminan suara rakyat yang akan menentukan pemimpin suatu negara untuk menentukan nasib dan tujuan kedaulatan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Pada lima tahun yang lalu, bangsa Indonesia telah melakukan pesta demokrasi yang sangat sengit. Dikarenakan pada saat itu terdiri dari dua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sehingga mengakibatkan terjadi gejolak setelah pemilihan sampai berakhir pada persidangan Mahkamah Konstitusi.

Namun ditahun 2017, di sinilah pertarungan politik terjadi dimana bangsa Indonesia seakan di “sihir” oleh politik tingkat tinggi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Yang paling diingat oleh seluruh rakyat Indonesia yakni adanya istilah “Penistaan Agama” yang mengakibatkan terjadinya fenomena aksi 411 dan 212 yang pusat aksinya di

Monas. Inilah awal munculnya politik identitas dengan berkembangnya isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) yang terus menjadi isu utama sampai Pilpres 2019. Pilkada DKI Jakarta tersebut telah memberikan ketegangan politik pada berbagai lapisan masyarakat. Menurut pandangan penulis, inilah awal dari panasnya perpolitikan Indonesia dan mengakibatkan polarisasi dalam masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Menurut Dr. Gun Gun Heryanto fenomena tersebut menunjukkan gejala *retrogresi*, yaitu pemburukan kualitas politik kebangsaan akibat polarisasi dukungan politik yang menghadirkan kebencian antarpenduduk.¹ Tak heran jika kontestasi politik tersebut menciptakan disilusi berlebihan berbagai tokoh di masyarakat sehingga menciptakan persoalan baru pasca perhelatan momentum politik hingga saat ini.

Pada tahun 2019 Indonesia akan dicatat dalam sejarah karena melakukan pesta demokrasi yang terbesar di dunia. Dikarenakan digabungnya pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan DPRD, DPR, dan DPD dari tingkat daerah hingga pusat, sehingga tentu menghabiskan anggaran yang sangat banyak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden kembali yaitu Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. Puncak dari kontestasi politik tersebut dilaksanakan pada bulan April 2019. Perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut telah menyita perhatian masyarakat luas.

Dalam proses demokrasi pada Pemilihan Umum Pemilihan Presiden 2019 yang penuh dengan hiruk-pikuk tersebut, tim kontestan unjuk diri dengan cara masing-masing, baik janji-janji apabila terpilih nanti maupun dengan isu-isu yang menjadi kebutuhan untuk kemenangan selalu disampaikan kepada masyarakat.

Suasana panggung politik yang sangat panas dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan sangat kental dirasakan lebih dominan

¹ Gun Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik, Bingkai Politik Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2018), hlm. 26.

dibandingkan dengan esensi kampanye Pemilihan Umum Presiden itu sendiri. Sampai timbul julukan “*cebong*” dan “*kampret*” yang kurang baik dan melekat bagi para pendukung. Serta banyaknya hoax yang bertebaran sehingga menimbulkan opini publik ditengah masyarakat mengenai calon Presiden. Peranan ulama yang masuk dalam kontestasi politik praktis bertambah, selain sebagai kontestan politik atau relawan pendukung, ulama juga harus mampu mengontrol polarisasi yang begitu masif di masyarakat.

Berbagai elemen masyarakat turut ambil bagian dalam mensukseskan perhelatan demokrasi ini. Banyak yang ikut dalam percaturan panggung politik dengan menjadi tim pemenangan masing-masing pasangan calon presiden dan waki presiden. Dari pasangan Joko Widodo- KH. Ma'ruf Amin dikenal dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) sedangkan pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno dikenal dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN). Namun tak hanya para politisi yang notabene nya memiliki kepentingan saja, masyarakat biasa pun ikut berpartisipasi secara aktif mengkampanyekan pasangan calon masing-masing yang pada gilirannya dinamakan ‘relawan’, baik dari kota-kota besar hingga pelosok pedesaan. Begitu pula tidak ketinggalan dari kalangan pemuka agama yang dikenal dengan Ulama, Kiai pesantren, Tuan Guru maupun ustadz yang sangat identik dengan penerus perjuangan Islam.

Sejak pertama kali pemilihan Umum diselenggarakan pasca reformasi pada 1999, peran ulama atau pemuka agama sangat besar dalam proses demokrasi tersebut. Tidak hanya pada tingkat pusat, ditingkat daerah pun tidak sedikit dari ulama atau pemuka agama yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik untuk jabatan eksekutif dan legislatif, atau menjadi tim pemenangan untuk calon tertentu.

Dalam dinamika sosial dewasa ini, ulama tidak hanya dimaknai orang yang hanya “berkecimpung” di bidang keagamaan saja, namun tugas ulama juga menjadi kontrol masyarakat, menata kehidupan sosial, dan sebagai agen perubahan. Peran ulama mulai bergeser dan meluas ketika masuk ke wilayah

politik dengan ikut berperan dalam kegiatan politik praktis.² Hingga mampu melakukan hegemoni terhadap masyarakat melalui peran yang dimilikinya.

Realitas semacam ini terjadi di Nusa Tenggara Barat terkhususnya di Pulau Lombok yang mayoritas pemeluk agama Islam. Basis ke-Islam-an masyarakat Lombok mayoritas berafiliasi pada golongan tradisional, dalam hal ini Nahdlatul Wathan (NW), sehingga sebutan untuk masyarakat NW adalah *Nahdliyin* dan *Nahdliyat*.

Nahdlatul Wathan merupakan organisasi sosial kemasyarakatan tertua dan terbesar di Lombok dengan focus kegiatan pada bidang pendidikan, sosial dan dakwah keagamaan. Organisasi yang kemudian disingkat menjadi NW ini didirikan oleh seorang ulama besar yang bernama Maulana Syaikh TGKH³. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pada awalnya embrio NW dimulai dari pendirian Pondok Pesantren Al Mujahidin pada tahun 1937, kemudian dideklarasikan dan terdaftar resmi sebagai ormas Islam pada hari minggu 15 Jumadil Akhir 1372 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.⁴ Kenyataan ini juga menggambarkan afiliasi pilihan politik masyarakat Lombok, sehingga peran Ulama atau lebih dikenal dengan sebutan Tuan guru sangatlah besar.

Tuan dalam masyarakat Lombok berarti orang yang sudah melaksanakan haji, dan *guru* berarti orang yang mengajar. Sehingga tuan guru dalam pandangan masyarakat Lombok adalah gelar yang murni yang diberikan oleh masyarakat Lombok karena memiliki keilmuan agama yang luas, serta memiliki akhlak dan kesalehan yang luar biasa. Tuan guru merupakan sebutan untuk ulama atau setara kiai kalau di pulau Jawa. Oleh karenanya sering sekali masyarakat memberikan pilihannya sesuai dengan instruksi dari ulama, kiai, tuan guru atau tokoh agama setempat.

² Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah Nahdlatul Ulama, 1952-1967*, (Yogyakarta : LKis, 2003), hlm. 69.

³ TGKH adalah singkatan dari “Tuan Guru Kiai Haji”, julukan yang diberikan bagi seorang ulama yang karismatik yang memiliki peran sangat penting dalam perjuangan Islam khususnya di daerah Lombok NTB.

⁴ Abdul Hayyi Nu'man, *Riwayat Hidup dan Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid*. (Pancor : PBNW, 1999), hlm. 139.

Bagi warga NW, tuan guru memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan masyarakat biasa. Bukan hanya ketaatan dalam hal menjalankan nasihat-nasihat keagamaan saja, namun dalam penentuan pilihan politik. Sebagai organisasi kemasyarakatan, sejak berdirinya NW telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan dakwah saja tetapi ikut berkiprah didunia perpolitikan untuk bisa menyampaikan aspirasi organisasi secara langsung. Beberapa kali pada pemilihan umum seperti Pemilihan Umum legislative dan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat dan Lombok Timur Khususnya, posisi ulama atau tuan guru dan organisasi Nahdlatul Wathan menjadi penting dan sangat diperhatikan.

Pada momentum Pemilihan Umum Presiden 2019 ini, karisma seorang ulama sangat bermanfaat bagi aktor-aktor politik untuk menjangkau suara masyarakat kelas bawah. Berbagai cara dilakukan supaya mendapatkan afiliasi politik dengan tokoh ulama sehingga mendapatkan dukungan dari sosok ulama, dengan tujuan agar memperoleh suara yang banyak dimana ulama tersebut berada. Seperti pada calon presiden 01 Joko Widodo memilih wakil dari kalangan ulama yaitu KH. Ma'ruf Amin dan mendapat dukungan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sedangkan bagi pasangan 02 Prabowo-Sandiaga Uno mendapatkan dukungan politik dari ulama-ulama PA 212. Hal ini sangat jelas terlihat dengan diadakannya Ijtima ulama yang sampai berjilid-jilid. Dan terbukti ketika pasangan calon presiden Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin berhasil mendapatkan restu dari tokoh ulama NW, terjadi peningkatan suara di daerah Nusa Tenggara Barat.

Dengan peran dan statusnya tersebut, komunikasi politik ulama pada masyarakat *Nahdliyin* Pancor dianggap mampu meyakinkan masyarakat dalam membentuk opini publik dan memberikan *branding* calon Presiden dan Wakil Presiden daripada komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi. Bagaimana tidak, Pancor dikenal dengan sebutan 'kota santri' yang merupakan pusat dari organisasi Nahdlatul Wathan. Ditambah dengan kemampuan ulama dalam menyampaikan pesan kepada para santri dan

masyarakat menjadikan masyarakat Pancor *ta'dzim*. Hal ini dapat dilihat pada acara-acara besar yang diselenggarakan, seperti pada pengajian akbar, seminar, silaturahmi yayasan, kuliah umum, dan perayaan hari ulang tahun (hultah) NW.

Namun pada Pilpres 2019 ini berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya, Nahdlatul Wathan yang memiliki basis dukungan di Nusa Tenggara Barat yang sangat besar belum mampu memberikan kemenangan yang signifikan bagi afiliasi politiknya. Pada 2014 lalu memang NTB merupakan wilayah peraihan suara yang besar bagi pasangan Prabowo-Hatta, dan pada saat itu NW berafiliasi politik dengan pasangan Prabowo-Hatta juga. Namun pada Pilpres 2019, NW memberikan restu dan dukungan politiknya pada pasangan Jokowi-Ma'ruf yang merupakan lawan politik dari Prabowo-Sandiaga.

Hal ini terjadi setelah ketua umum PBNW TGB. Dr. H. M. Zainul Majdi. MA, memberikan pernyataan dan sikap dukungan bagi pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, sehingga terjadi polarisasi yang sangat luar biasa di masyarakat NTB secara umum dan warga *Nahdliyin* secara khusus. Begitu pula di wilayah Pancor yang merupakan pusat dari Organisasi NW, dari hasil perhitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin mendapatkan suara 55,68% sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno mendapatkan suara 44,32%.⁵

Oleh karena itu, untuk menyampaikan pesan-pesan dalam komunikasi politik dengan tujuan meyakinkan dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilihan Umum Presiden 2019, serta dalam membentuk opini publik pada masyarakat maka penting menentukan strategi dan sarana yang tepat, sesuai dengan kondisi kepada siapa pesan politik tersebut disampaikan.

Dari sini kemudian peneliti melihat bahwa penelitian mengenai keterlibatan dan strategi komunikasi politik ulama Nahdlatul wathan pada Pilpres 2019 ini menjadi menarik untuk diteliti dan dipelajari.

⁵ <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/> diakses pada tanggal 19 agustus 2019

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi politik ulama nahdlatul wathan dalam membentuk opini publik pada pemilihan umum presiden tahun 2019, di Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi politik ulama Nahdlatul Wathan dalam membentuk opini publik pada pemilihan umum Presiden tahun 2019, di Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan akademis serta menambah kekayaan literatur dalam diskursus kajian ilmiah dalam bidang ilmu komunikasi dan bidang politik, khususnya kajian strategi komunikasi politik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi pengurus struktural organisasi Nahdlatul Wathan dalam penguatan strategi komunikasi politik.
- 2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan solusi untuk mengantisipasi adanya polarisasi yang berlebihan di internal warga *Nahdliyin* maupun masyarakat luas. Apalagi sampai terjadi konflik yang berlanjut seperti saling mencurigai, menghujat dan ujaran kebencian yang diakibatkan polarisasi berlebihan.

- 3) Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama.

